

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN
2016 TENTANG KARTU NELAYAN DI DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Oleh :

RONI SETIAWAN
NPM 1503100131

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **RONI SETIAWAN**
N P M : 1503100131
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16
TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN DI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Medan, 9 Maret 2019

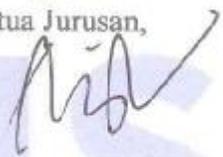
Dosen Pembimbing



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan,



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

UMSU
Unggul Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **RONI SETIAWAN**
N P M : 1503100131
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 07.45 WIB s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D. (.....)
PENGUJI II : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)
PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan ini Saya, Roni Setiawan NPM 1503100131 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 09 Maret 2019

Yang menyatakan,



RONI SETIAWAN

ABSTRAK

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

RONI SETIAWAN

1503100131

Program kartu nelayan merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program bantuan kepada nelayan agar tepat sasaran. Fungsi dari kartu nelayan sebagai identitas profesi nelayan, memberikan kemudahan dalam pembinaan nelayan dan memberikan kemudahan pelaksanaan program kementerian. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal memiliki kewenangan penyelenggara program kartu nelayan di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif yaitu metode yang mencari dan memperoleh informasi secara mendalam kepada narasumber yang memiliki banyak informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kelengkapan data penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal sudah mendekati hasil yang baik. Dengan adanya tindakan sosialisasi, pendataan dan pendistribusian kartu nelayan. Komunikasi yang dijalin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal sudah baik, namun terdapat kendala terhadap sumberdaya yang tersedia dalam mendukung pencetakan kartu nelayan dan aspek – aspek yang dapat mempengaruhi kesejahteraan nelayan dan pemberdayaan masih belum menyeluruh karena masih nelayan tidak mengetahui fungsi dari kartu nelayan.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan dan Kartu Nelayan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan bagi umat manusia dengan Ilmu Pengetahuan.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggungjawab intelektual sebagai seorang mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi dengan judul “ Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada nama – nama dibawah ini.

1. Teristimewa kepada orangtua penulis Ayahanda Yanson Jambak dan Ibunda Darmayani yang telah banyak memberikan dukungan dan do’a kepada penulis sehingga penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, S.Sos, M.Sp selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

4. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Sebagai Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Dosen – dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah berbagi pengetahuan dan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Seluruh pegawai Biro fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Bakhrein Lubis selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal
8. Ibu Masdewina selaku Kasi Pemberdayaan Nelayan Kecil yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
9. Bapak Sabungan Harahap, S.P selaku Kasi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
10. Bapak Imron Efendi, S.Pt selaku Kasi IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian

11. Bapak Rahmadi Anas, Azmul dan Agusman Efendi sebagai narasumber yang memberikan informasi terkait dengan penelitian.
12. Untuk saudaraku Regita Indah Riani Putri yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk kelancara studi.
13. Untuk Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai wadah penulis dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dan pengalaman.
14. Untuk sahabat kelompok empat Praktik Penelitian Lapangan Randi Permana, Della Farantinata Dalimunthe, Asri Utari Nasution, Nicken Hafizah Siregar dan Lisa Andriani Purba.
15. Untuk sahabat saya Rudi Syaputra Nasution yang sudah memberi bantuan dan dukungan selama penulis melakukan penelitian.
16. Seluruh teman - teman Mahasiswa/i Administrasi Publik stambuk 2015 kelas Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik C Siang.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak terima kasih. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Serta tidak lupa penulis juga memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik untuk kedepannya, Aamiin.

Medan, 09 Maret 2019
Penulis

RONI SETIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
 BAB II URAIAN TEORITIS	
1.1 Implementasi	9
1.1.1 Pengertian Implementasi	9
1.2 Model – Model Implementasi	10

1.3 Kebijakan	15
1.3.1 Pengertian Kebijakan	15
1.4 Kebijakan Publik	16
1.4.1 Tahap – Tahap Kebijakan Publik	17
1.4.2 Kriteria Penentuan Kebijakan Publik	18
1.4.3 Tingkatan Kebijakan	18
1.5 Evaluasi Kebijakan Publik	19
1.6 Pengertian Implementasi Kebijakan	20
1.6.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	20
1.6.2 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan	21
1.6.3 Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan	25
1.7 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	26
1.8 Pengertian Kartu Nelayan	28
1.9 Konsepsi Pemberdayaan	28

BAB III METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian	31
1.2 Kerangka Konsep	32
1.3 Defenisi Konsep	32

1.4 Kategorisasi	33
1.5 Narasumber	33
1.6 Teknik Pengumpulan Data	34
1.7 Teknik Analisis Data	35
1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
1.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Deskripsi Narasumber	45
4.2 Pembahasan	47
4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	47
4.2.2 Analisis Hasil Wawancara	56
4.3 Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal	60

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konsep	32
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nelayan Kabupaten Mandailing Natal	3
Tabel 4.1.1	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.1.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	46
Tabel 4.1.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: SK- I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	: SK- II Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran IV	: SK- III Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran V	: SK – IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK – V Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	: SK – X Undangan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Izin Riset
Lampiran IX	: Surat Balasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang sebagian besar wilayahnya perairan atau maritim dengan luas 3.257.483 km². Dengan kondisi geografis yang strategis dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dari sektor kelautan, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan, khususnya yang bertempat tinggal di daerah pesisir. Penduduk yang bekerja sebagai nelayan, memanfaatkan potensi- potensi sumber daya alam kelautan dengan aktifitas menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Sesuai dengan amanat Undang – undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 Ayat 3 mengatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat, oleh sebab itu pemerintah memiliki tugas dalam rangka memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya, termasuk kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan amanat Undang – undang dasar 1945, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan program – program yang bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat regulasi mengenai program –

program terhadap nelayan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan terhadap nelayan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 tentang kartu nelayan adalah peraturan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan bertujuan dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, peningkatan kesejahteraan, menciptakan efektivitas dan efisiensi program bantuan kepada nelayan agar tepat sasaran. Peraturan menteri kelautan dan perikanan ini agar dapat memaksimalkan identifikasi terhadap para nelayan.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 tentang kartu nelayan dituliskan bahwa fungsi kartu nelayan adalah sebagai identitas profesi nelayan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan; memberikan kemudahan dalam pembinaan nelayan; dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program kementerian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang kartu nelayan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kartu nelayan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Penyelenggara kartu nelayan terdiri atas Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/kota.

Sasaran dari regulasi yang diselenggarakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terdiri dari nelayan – nelayan yang berada di daerah - daerah yang belum memiliki identitas sebagai nelayan. Pentingnya regulasi ini bagi nelayan adalah sebagai identitas dalam memudahkan mendistribusikan program –

program bantuan pemerintah terhadap nelayan agar tepat sasaran, perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari kondisi geografis, Kabupaten Mandailing Natal memiliki wilayah yang berbatasan dengan lautan. Kondisi ini memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan kondisi mata pencaharian di Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan berada di Kecamatan Muara Batang Gadis sebanyak 1.432 orang, Kecamatan Natal sebanyak 1020 orang dan Kecamatan Batahan sebanyak 882 orang. Sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Nelayan di Kabupaten Mandailing Natal

Kecamatan	Nelayan
1. Batahan	882
2. Sinunukan	0
3. Batang Natal	0
4. Lingga Bayu	0
5. Ranto Baek	0
6. Kota Nopan	0
7. Ulu Pungkut	0
8. Tambangan	0
9. Lembah Sorik Marapi	0
10. Puncak Sorik Marapi	0

11. Muara Sipongi	0
12. Pakantan	0
13. Panyabungan	0
14. Panyabungan Selatan	0
15. Panyabungan Barat	0
16. Panyabungan Utara	0
17. Panyabungan Timur	0
18. Huta Bargot	0
19. N a t a l	1 020
20. Muara Batang Gadis	1 432
21. S i a b u	0
22. Bukit Malintang	0
23. Naga Juang	0
Mandailing Natal 2013	3 334
2012	1 835
2011	2 361

Sumber : BPS Kabupaten Mandailing Natal

Nelayan memberikan kontribusi tersendiri yang besar bagi daerahnya melalui sektor perikanan terhadap Pendapatan Domestik Bruto daerah. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, tiga lapangan usaha yang memberi peran terhadap PDRB Mandailing Natal pada tahun 2017 yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 44,04 persen, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,98 persen serta konstruksi sebesar 12,91 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 63,54 persen,

menyusul komponen impor barang dan jasa sebesar 38,82 persen dan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 30,09 persen.

Besarnya peran sektor perikanan terhadap PDRB Mandailing Natal, tidak memperlihatkan penghasilan yang pasti terhadap pendapatan nelayan. Sehingga kesejahteraan nelayan dari tidak tetapnya penghasilan yang didapatkan, maka dipastikan belum terdapatnya usaha pemberdayaan dan perlindungan yang diberikan terhadap nelayan. Dengan kondisi kesulitan yang di hadapi nelayan, pemerintah memberikan dan dukungan usaha pemberdayaan nelayan agar mampu menunjang kebutuhannya.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan kewenangan yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang kartu nelayan. Kewenangan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal adalah dalam hal sosialisasi fungsi kartu nelayan, identifikasi dan pendataan kebutuhan kartu nelayan, verifikasi dan penetapan kartu nelayan, memasukkan data identitas nelayan, melaksanakan pencetakan kartu nelayan, distribusi kartu nelayan, mengelola data base kartu nelayan.

Dari uraian diatas dapat dilihat banyaknya jumlah nelayan di Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing menjadi penyelenggara kartu nelayan. hal ini menarik perhatian penulis untuk memilih judul Implementasi Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 16

tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan wawasan penulis mengenai Implementasi Program Kartu Nelayan
2. Memberikan solusi terhadap masalah dan hambatan pada Implementasi program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal
3. Menambah wawasan penulis dibidang Administrasi Publik melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memeberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Administrasi Publik.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang memberikan landasan bagi penelitian dalam menguraikan Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Kartu Nelayan, Pengertian Pemberdayaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian, Tinjauan Ringkas Objek Penelitian, Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari data penelitian yang diperoleh dari lapangan yang di analisis sehingga penelitian ini dapat memberikan hasil pembahasan yang diberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan pada penelitian

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang – undang. implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang – undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan – tujuan kebijakan atau program – program.

Menurut Ripley dan Franklin (1982 : 4) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Menurut Grindle (1980 : 6) implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tugas implementasi mencakup terbentuknya “ *a policy delivery system*” dimana sarana – sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan – tujuan yang diinginkan.

Menurut Purwanto (2012 : 12) implementasi adalah mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Menurut Mazmanian (2014 : 139) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar , biasanya dalam keputusan – keputusan kolektif penting atau badan peradilan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan adalah proses usaha pelaksanaan keputusan yang dijalankan oleh suatu badan pemerintah yang memiliki otoritas yang diberikan oleh undang – undang dalam melaksanakan kebijakan atau keputusan kolektif dengan memanfaatkan sarana – sarana sebagai upaya mewujudkan tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Model – Model Implementasi

2.2.1 Model Implementasi George Edward III

George Edward III (1980 : 148) menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi menjadi efektif :

a) *Communication*, komunikasi memiliki peran /fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya.

Menurut Agustino (2006 : 157) mengemukakan bahwa kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.

Selanjutnya ia mengemukakan tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik 1) transmisi, sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumberdaya). 2) kejelasan (clarity), kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. 3) konsistensi, implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.

Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten disebabkan kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru; kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran atau bertentangan dengan kebijakan yang lain; banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan.

b) *resources* yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III yaitu 1) staf yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan; 2) informasi yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan; 3) kewenangan yang

dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. 4) fasilitas, fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif.

c) *Disposition*, berkenaan dengan sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana – pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan antara lain 1) kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana . Apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. 2) arahan dan tanggapan pelaksanaan, hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan. 3) intensitas respon atau tanggapan pelaksana

d) *bureaucratie structure*, struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. ia menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksana prrogram melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya

fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

2.2.2 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa ada enam variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- b. Sumberdaya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi)
- c. Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
- d. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hirarki pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.

- e. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi (apakah sumberdaya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung implementasi)
- f. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap).

2.2.3 Model Grindle

Grindle dalam bukunya yang berjudul *politics and policy implementation in the third world* (1980) mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *context*-nya, serta tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumberdaya implementasi yang diperlukan.

a. Content of Policy

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program
- 2) Jenis manfaat yang dihasilkan
- 3) Jangkauan perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pengambil keputusan
- 5) Pelaksana program
- 6) Sumberdaya yang disediakan

b. Context of Implementation

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

2.3 Kebijakan

2.3.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya dan tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas – tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Menurut Anderson (2005 : 21) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Wahab (2001 : 8) kebijakan adalah tindakan – tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu.

Menurut Friedrich (2007 : 20) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu dengan mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Lubis (2007 : 9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan –

hambatan tertentu mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan atau keputusan yang mengikat dalam rangka pencapaian tujuan yang dibuat oleh pemerintah atas dasar usulan sejumlah aktor, kelompok atau pemerintah sendiri.

2.4 Kebijakan Publik

Menurut Aminullah (2001: 371 – 372) kebijakan publik adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Abidin (2012 : 31) kebijakan publik adalah tindakan yang tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Dunn (2003 : 106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan – pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang – bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain – lain.

Menurut Anderson (2005 : 17) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan – kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

2.4.1 Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Tahap – tahap kebijakan publik menurut Winarno (2016 : 30) : a) Penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelum masalah – masalah ini berkompetisi terlebih dahulu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan; b) Formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah – masalah yang ada didefinisikan untuk dicarikan pemecahan masalah terbaik; c) Adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dri mayoritas legislatif; d) implementasi kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elite, jika program tidak diimplementasikan. Oleh karena itu kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan – badan administrasi maupun agen – agen pemerintah ditingkat bawah; e) evaluasi kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai

atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah mampu memecahkan masalah.

2.4.2 Kriteria Penentuan Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2004 : 56-57) tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut kriteria yang digunakan dalam menentukan kebijakan : a) efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang ingin dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan; b) efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai; c) cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada; d) adil; e) terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

2.4.3 Tingkatan Kebijakan

Menurut Abidin (2004 : 31-33) kebijakan dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan : a) kebijakan umum, adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi bersangkutan; b) kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang – undang; c) kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

2.5 Evaluasi Kebijakan Publik

2.5.1 Tujuan evaluasi

- a. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi anantara sebelum dan setelah adanya program tersebut. Mengukur efek menunjuk pada perlunya metodologi penelitian. Adapun membandingkan efek dengan tujuan mengharuskan penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan.
- b. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana.
- c. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi.
- d. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik/memenuhi akuntabilitas publik.

2.5.2 Fungsi Evaluasi (William N. Dunn; Ripley)

Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik karena sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut antara lains sebagai berikut :

- a. Memberikan eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan. dalam studi evaluasi perlu

dilakukan penelitian/kajian tentang hubungan kausal atau sebab akibat.

- b. Mengukur kepatuhan, artinya mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan auditing untuk melihat output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, ada-tidaknya kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, ada-tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program.
- d. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misalnya, seberapa jauh program yang dimaksud mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan.

2.6 Pengertian Implementasi Kebijakan

2.6.1 Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1947) implementasi kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu (atau kelompok – kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan sebelumnya.

Menurut Wahab (2001 : 45) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya

sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran – penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran – saluran birokrasi melainkan lebih dari itu.

Menurut Nugroho (2003 : 161) implementasi kebijakan publik adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen – elemen berikut, yaitu : a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (standard operating procedures) c) koordinasi, pembagian tugas – tugas di dalam dan diantara dinas – dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber – sumber daya untuk mencapai tujuan.

Menurut Winarno (2005 : 101) implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang ditetapkan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan adalah tindakan kegiatan untuk melaksanakan proses kebijakan untuk meraih tujuan – tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.6.2 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

a. Karakteristik dari masalah

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan. Di pihak lain terdapat masalah – masalah sosial yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah akan mempengaruhi mudah-tidaknya suatu program diimplementasikan.
2. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda.
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b. Karakteristik kebijakan

1. Kejelasan isi kebijakan. hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan

karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji. Walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.
4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana. kegiatan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
7. Seberapa luas akses kelompok – kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implemmtasi kebijakan.

c. Lingkungan Kebijakan

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian pula, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program karena program – program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
2. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif akan kurang mendapat dukungan publik.
3. Sikap kelompok pemilih. Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain 1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan – badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan 2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan – badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan – badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan pada badan legislatif.

4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

2.6.3 Kriteria Pengukuran Impelementasi Kebijakan

Kriteria pengukuran keberhasilan impelementasi menurut Ripley dan Franklin (1986 : 12) didasarkan pada tiga aspek yaitu :

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang – undang.
- b. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.
- c. Pelaksanaan dan dampak yang dihendaki dari semua program yang ada terarah.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan tersebut, perlu pula dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi :

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan;
- b. Sumber kebijakan;
- c. Ciri atau sifat badan/instansi pelaksana;

- d. Komunikasi antarorganisasi yang berkaitan dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan;
- e. Sikap para pelaksana;
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2.7 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2005 : 102) implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan individu atau kelompok – kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan – tindakan tersebut mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan – perubahan besar dan bahwa tiap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan – tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan – keputusan kebijakan.

Menurut Tangkilisan (2003 : 1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan – kebijakan seperti halnya dalam pasal – pasal sebuah undang – undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan

yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Nurdin (2002 : 116) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan – tujuannya.

Menurut Tachjan (2005 : 25) implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang disetujui sebuah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif – alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Menurut Dwijowijoto (2003 : 158) implementasi kebijakan publik adalah cara – cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan tindakan – tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan – tujuan kebijakan melalui program – program pemerintah.

2.8 Pengertian Kartu Nelayan

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Kartu nelayan adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan. Kartu nelayan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai: a) identitas profesi nelayan; b) basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan; c) memberikan kemudahan dalam pembinaan nelayan; dan d) memberikan kemudahan dalam pelaksanaann program kementerian.

2.9 Konsepsi Pemberdayaan

Menurut James William (1995) dalam *community development, creating community alternatives (vision, analysis and practice)* meyakini empowerment means providing people with the personal mobility and the domination by elites of power structures of society. Understood in these theme, then, empowering is a from of radical change, whing would overtum exiting structures of domination.

Selanjutnya vitayala (2000) menyatakan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah perwujudan *capacity building* masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, serta pengembangan 3-P; pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau ubah – ubahan yang

terjadi di masyarakat dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat.

Masih tentang konsep pemberdayaan, Sumodiningrat (1996), mengemukakan ada dua pemberdayaan yang saling terkait, masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai dengan kemampuannya.

Upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi : pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; kedua, memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta akses kedalam sumber – sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, lapangan pekerjaan dan pasar; ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti mencegah dan melindungi masyarakat dari kesenjangan ekonomi serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dan yang belum berkembang.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha dalam meningkatkan kemampuan sebuah kelompok masyarakat

dengan menggerakkan partisipasi masyarakat, memperkuat kondisi ekonomi masyarakat melalui perkuatan modal, teknologi dan prasarana – sarana.

BAB III

METODE PENELITIAN

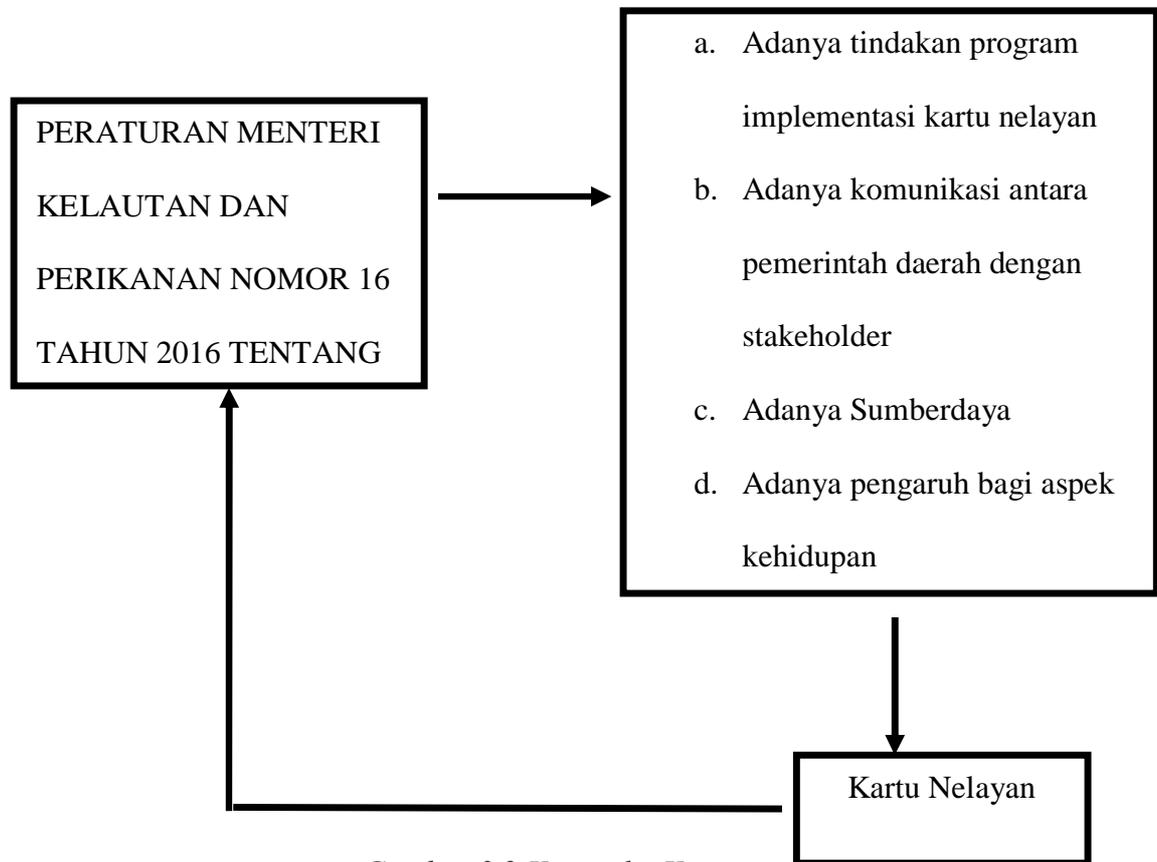
3.1 Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data penelitian di lapangan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki melalui pengamatan dengan menggambarkan keadaan atau sistusi objek penelitian yang berdsarkan fakta – fakta yang ditemukan.

Menurut Sugiyono (2010 : 11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Menurut Moeloeng (2006 : 11) pada penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata – kata, gambar dan bukan angka – angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain – lain.

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.2 Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Impelementasi adalah suatu proses aktifitas atau kegiatan dalam melakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan hasil yang sudah ditetapkan.
2. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan – tindakan atau keputusan – keputusan yang dibuat oleh institusi dan lembaga publik yang memiliki dampak bagi masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan Publik adalah proses kegiatan dalam melaksanakan seluruh kebijakan atau keputusan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
4. Kartu Nelayan adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan.
5. Pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan menggerakkan partisipasi masyarakat, memperkuat kondisi ekonomi masyarakat melalui penguatan modal, teknologi dan sarana – prasarana.

3.4 Kategorisasi

Adapun kategorisasi penelitian ini adalah :

- a. Adanya tindakan program implementasi kartu nelayan
- b. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder
- c. Adanya Sumberdaya
- d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

3.5 Narasumber

Untuk mendapatkan dan melengkapi data, maka peneliti menggunakan narasumber atau keyinforman. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Nama : Masdewina
Usia : 50 tahun
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil
- b. Nama : Sabungan, SP
Usia : 50 tahun
Jabatan : Kasi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan
Nelayan Kecil
- c. Nama : Imron Efendi, S.Pt
Usia : 39 tahun
Jabatan : Kasi IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil
- d. Nama : Agusman Efendi
Usia : 45 tahun
Pekerjaan : Ketua Koperasi Nelayan
- e. Nama : Azmul
Usia : 40 tahun
Pekerjaan : Nelayan
- f. Nama : Rahmadi Anas
Usia : 42 tahun
Pekerjaan : Nelayan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti di lokasi penelitian yang terdiri dari :

1. Wawancara

Peneliti mendapatkan data dan informasi dengan melakukan dialog dan ineraksi dengan narasumber atau keyinforman untuk mendapatkan keakuratan data.

2. Dokumentasi

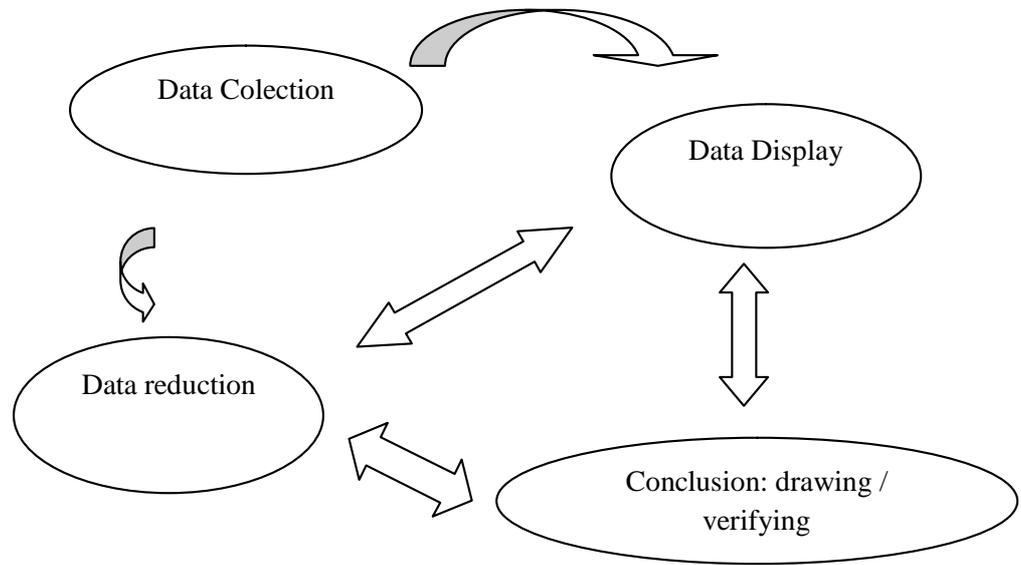
Peneliti mendapatkan data melalui tulisan, gambar dan foto untuk mendukung informasi dalam kegiatan penelitian.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti mendapatkan dukungan informasi melalui studi pustaka, jurnal, peraturan perundang – undangan dan buku yang relevan dengan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan menemukan data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan serta verifikasi.



a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal – hal yang pokok memfokuskan pada hal – hal yang penting untuk dicari tema dan polanya dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data sudah direduksi maka selanjutnya mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan flowchart.

c. Verifikasi/ Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung bukti – bukti valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka merupakan kesimpulan yang kredibel

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan tempat penelitian ini berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dan waktu penelitian dimulai dari bulan Januari sampai Bulan Februari 2019.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal

1) Visi

“Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berbudaya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ”

2) Misi

- a. Meningkatkan produksi, produktifitas dan kualitas usaha perikanan dan pengolahannya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- b. Meningkatkan akses permodalan dan skala usaha serta iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha kelautan dan perikanan
- c. Meningkatkan usaha pengelolaan hasil serta pemasaran produk perikanan
- d. Meningkatkan kesejahteraan aparaturnya, masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan pemberdayaan masyarakat pulau – pulau kecil.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :
1. Menyiapkan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
 2. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
 3. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil;
 4. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil, pelaksanaan lelang lebak lebung dan penebaran benih ikan ke lokasi lelang lebak lebung dalam kabupaten Banyuasin.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil

- a. Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil.

b. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :

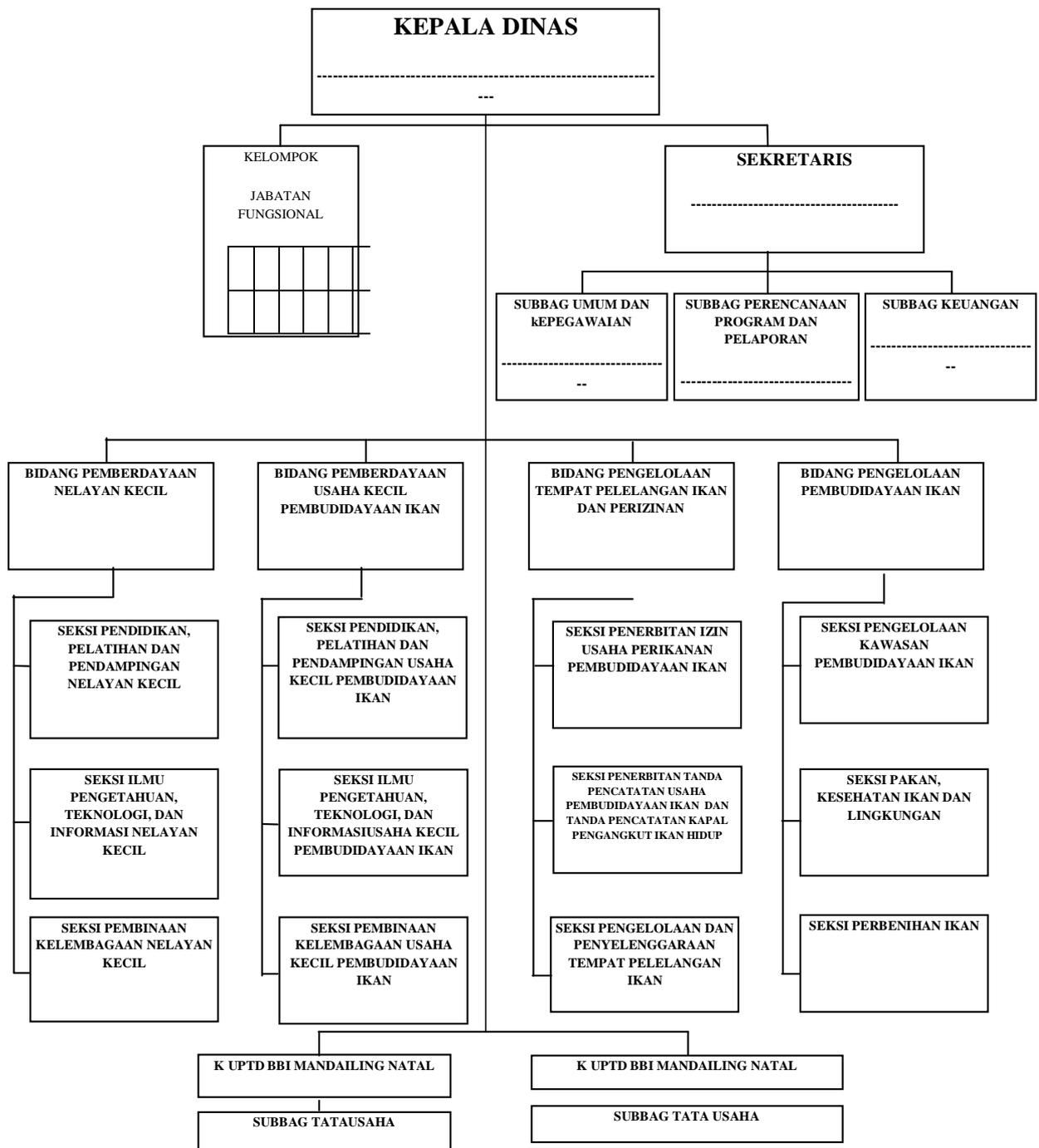
1. Mengumpulkan data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil;
2. Mengidentifikasi data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil;
3. Menganalisis data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil;
4. Menyiapkan bahan perumusan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan kebijakan tentang pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil;
6. Mengevaluasi serta melaporkan hasil kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil

- a. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil.

- b. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ilmu Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :
1. Mengumpulkan data pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 2. Mengidentifikasi data pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 3. Menganalisis data bahan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 4. Menyiapkan bahan perumusan pembinaan kelembagaan nelayan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 5. Melaksanakan kebijakan tentang pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 6. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pembinaan kelembagaan nelayan kecil berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

D. Daftar Nama Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	BAKHREIN LUBIS	IV/c	Kepala Dinas
2	MASDEWINA	IV/b	Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil
3	LATIPA HANNUM DALIMUNTHE, SP	IV/a	Sekretaris
4	Dra. KARLINA	IV/a	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5	SATRUDDIN, SH	IV/a	Kabid Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perizinan
6	SYAFRUDDIN, S. Pi	IV/a	Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
7	GOIMAWAN, S.Pi,M.Si	IV/a	Kasi IPTEK Dan Informasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
8	Drs. ASRUL ANWAR LUBIS	IV/a	Kasi Pakan, Kesehatan, Ikan dan Lingkungan
9	EFENDI,A.Pi	III/d	Kasi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil
10	NURHAIDAH HARAHAHAP, S.Pi	III/d	Kasi.Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
11	MUKSIN NASLI, S.Pi	III/d	Kasi Pegelolaan Dan Penyeleggaraan Tempat Pelelangan Ikan
12	JUNIAH HANUM,S.Pi	III/d	Kasi Pembibitan Ikan
13	IRWANSYAH,S.Pi	III/d	Kabid Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

14	SABUNGAN,SP	III/d	Kasi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil
15	LUKMAN HAKIM,S.Pi	III/d	Kasi Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
16	EVA JULIANTI LUBIS, SE	III/c	Kasubbag Keuangan
17	ANNA DELINA, S.Sos	III/c	Kasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
18	IMRON EFENDI,S.Pt	III/c	Kasi IPTEK, dan Informasi Nelayan Kecil
19	FEBRIDAWATI TANJUNG, S. Pi	III/c	Kasubang Perencanaan Program dan Pelaporan
20	MARIYATUN,SE	III/b	Kasi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan
21	SITI AMINAH, SE	III/b	PJ. Kasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan
22	AMRI NASUTION, S.ST	III/b	Ka. UPTD TPI Mandailing Natal
23	TOGUAN HARDI HARAHAHAP	III/a	Kasubbag TU UPTD BBI

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data – data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki – laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

Distribusi Narasumber Berdsarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – laki	5	90%
2	Perempuan	1	10
	Jumlah	6	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki – laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan persentase 90% sedangkan 1 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 1 atau 10%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 – 39 tahun, umur 40 – 49 tahun dan umur 50 – 59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing – masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.1.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30 – 39	1	10 %
2	40 – 49	3	50 %
3	50 – 59	2	40 %
	Jumlah	6	100%

berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 40-49 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 50%. Begitu halnya dengan umur 50-59 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 40% dan umur 30-39 tahun dengan frekuensi 1 atau 10%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil dan nelayan. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing – masing sebagai berikut

Tabel 4.1.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	3	50%
2	Nelayan	3	50%
	Jumlah	6	100%

berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 3 orang atau 50% dan sebagai nelayan dengan frekuensi 3 atau 50%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya tindakan program implementasi kartu nelayan

Program kartu nelayan dibuat oleh kementerian kelautan dan perikanan dalam usaha memberikan perlindungan dan kemudahan bagi nelayan – nelayan yang berada di daerah pesisir agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan untuk mendapatkan perlindungan dan

bantuan. Mengingat program kartu nelayan merupakan program dari kementerian kelautan dan perikanan maka kewenangan untuk melaksanakan program di Kabupaten/kota diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya Dinas kelautan dan perikanan harus menjalankan program sesuai dengan kewenangan yang di milikinya. Oleh sebab itu Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal melakukan sebuah tindakan yang dijalankan untuk melancarkan program kartu nelayan. Terlaksananya tindakan yang dilakukan Dinas kelautan dan perikanan dapat dilihat dari usaha para pegawai dalam memaksimalkan tugas yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masdewina selaku Kasi Pemberdayaan Nelayan Kecil Dians Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 7 Februari 2019 mengatakan bahwa dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal, para pegawai sudah melakukan tindakan berupa sosialisasi mengenai kartu nelayan kepada para nelayan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Sosialisasi yang dilakukan melalui sosialisasi kartu nelayan perkecamatan, maupun sosialisasi kepada camat – camat dan kepala desa – kepala desa yang ada di daerah pantai barat. Setelah melakukan sosialisasi para pegawai melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan. Pengumpulan data nelayan dilakukan melalui permintaan data kepada masing – masing kecamatan untuk disampaikan kepada kepala desa – kepala desa. Pengumpulan data dilakukan juga dengan mengumpulkan data langsung kepada nelayan. Untuk

pendistribusian kartu nelayan juga dilakukan melalui kecamatan dan kepala desa ataupun secara langsung kepada nelayan.

Sama halnya dengan Bapak Sabungan selaku Kasi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil dan Bapak Imron Efendi selaku Kasi IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil yang penulis wawancara pada tanggal 7 Februari 2019 mengatakan bahwa dalam melaksanakan program kartu nelayan para pegawai di Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal melakukan sosialisasi terhadap nelayan dengan tentang fungsi kartu nelayan terhadap para nelayan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberitahukan kepada camat dan seterusnya camat memberitahukan kepada kepala desa serta melakukan penyuluhan terhadap nelayan – nelayan. Sedangkan untuk pendataan dan pendistribusian kartu nelayan dilakukan melalui kepala desa – kepala desa dan nelayan.

Begitu juga hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2019 dengan Bapak Azmul dan Rahmadi Anas selaku masyarakat yang bekerja sebagai nelayan mengatakan bahwa para pegawai Dinas Kelautan dan perikanan melakukan sosialisasi terhadap nelayan. Para pegawai Dinas Kelautan dan perikanan juga melakukan identifikasi dan pendataan terhadap masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan untuk mendistribusikan kartu nelayan para pegawai Dinas mendistribusikannya melalui kepala desa dan koperasi nelayan.

Sementara hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2019 dengan Bapak Agusman Efendi selaku Ketua Koperasi Nelayan mengatakan bahwa pegawai

dinas melakukan sosialisasi kartu nelayan kepada nelayan dengan diwakili oleh Ketua koperasi nelayan. Sosialisasi dilakukan melalui pemberitahuan kepada camat dan kepala desa melalui surat yang selanjutnya kepada masing – masing koperasi nelayan. Untuk pendataan dan identifikasi nelayan dilaksanakan dengan memberikan formulir kepada nelayan secara langsung untuk diisi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pendistribusian kartu diberikan kepada koperasi nelayan.

b. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder

Untuk mempermudah dalam melaksanakan program kartu nelayan terhadap nelayan – nelayan yang berada di daerah pesisir dibutuhkan kerjasama antara Dinas Kelautan dan perikanan dengan stakeholder yang berada di kecamatan dan desa – desa. Dinas Kelautan dan perikanan menjalin kerjasama dan komunikasi agar mampu memaksimalkan program kartu nelayan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masdewina selaku Kasi pemberdayaan Nelayan Kecil dan Sabungan Harahap selaku Kasi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 7 Februari 2019 mengatakan bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal menjalin kerjasama dalam bentuk surat pemberitahuan tentang kartu nelayan kepada camat dan diteruskan kepada kepala desa agar mampu menyampaikan hal yang menyangkut sosialisasi dan penyuluhan kepada nelayan. Dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder yang berada di kecamatan terdapat masukan

dari kepala desa – kepala desa agar kartu nelayan tepat sasaran dengan tujuan diberikan kepada yang benar – benar memiliki pekerjaan sebagai nelayan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imron Efendi selaku Kasi IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil mengatakan hal yang sama pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan kerjasama untuk melancarkan program kartu nelayan di kecamatan dan desa. Dan masukan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal supaya kartu nelayan didapatkan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Azmul dan Rahmadi Anas selaku masyarakat yang bekerja sebagai nelayan mengatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal melakukan kerjasama dengan melibatkan pihak – pihak yang berada di kecamatan dan desa – desa untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi serta dari nelayan berharap agar kartu nelayan agar diberikan kepada yang seharusnya layak mendapatkan kartu nelayan.

Untuk hasil wawancara dengan Bapak Agusman Efendi selaku Ketua Koperasi Nelayan mengatakan bahwa kerjasama yang dijalin Dinas Kelautan dan Perikanan sudah dilakukan dengan kecamatan, namun sebagai ketua koperasi nelayan berharap agar kartu nelayan dapat dimiliki sepenuhnya secara fisik oleh para nelayan agar dapat segera mengakses bantuan yang diharapkan nelayan.

c. Adanya Sumberdaya

Program kartu nelayan akan berjalan dengan lancar dan maksimal apabila didukung dengan ketersediaan sumberdaya yang dapat berupa sarana – prasarana dan sumberdaya manusia yang menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan kebutuhan menyangkut fasilitas pendukung dalam merealisasikan kartu nelayan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Masdewina selaku Kasi Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa untuk ketersediaan prasarana dan sarana untuk mendukung program kartu nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal hanya sebagai pengumpul data dan penginput data serta pendistribusi kartu nelayan sedangkan untuk sarana fasilitas pencetakan kartu berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk dukungan anggaran atau hanya sebatas biaya sosialisasi, pengumpul data dan pendistribusian kartu sedangkan untuk anggaran pengadaan kartu nelayan ini semuanya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, hal ini karena program dari kementerian kelautan dan perikanan. Dalam menjalankan tanggungjawabnya pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal hanya sebatas memfasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengumpulan data, penginput data dan pendistribusian kartu nelayan.

Sama halnya dengan Bapak Sabungan Harahap selaku Kasi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil dan Imron Efendi selaku Kasi IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil mengatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapten Mandailing Natal sebatas pelaksana program Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal. Para pegawai hanya sebagai fasilitator mengumpulkan data, menginput data dan mendistribusikan kartu kepada nelayan, dukungan anggaran dan pencetak kartu berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Begitu juga dengan Bapak Rahmadi Anas, Bapak Azmul dan Agus Efendi menyatakan bahwa program kartu nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semua pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang diberi kewenangan untuk menjalankan program kartu nelayan hanya melaksanakan tugas untuk sosialisasi, pendataan dan pembagian kartu nelayan kepada nelayan. Untuk anggaran dan biaya langsung di biayai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

d. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

Adanya program Kartu Nelayan yang dibuat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam bentuk kesejahteraan dan pemberdayaan yang berikan kepada nelayan. Aspek – aspek yang mempengaruhi bagi kehidupan nelayan yang diperoleh dari program kartu nelayan berupa perlindungan dan identitas yang menjamin kehidupan nelayan serta bantuan – bantuan berupa alat tangkap,

kapal dan mesin kapal dan asuransi nelayan yang diperoleh dari pemerintah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Masdewina selaku Kasi Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa kartu nelayan dapat memberikan manfaat yang dapat mendukung kesejahteraan dan kemudahan bagi nelayan yang selama ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan aktifitas kelautan dan penangkapan ikan. Namun pemanfaatan kartu nelayan belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal disebabkan masih banyak nelayan belum mengerti tentang manfaat yang diperoleh bila memiliki kartu nelayan. Untuk pendistribusian kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal belum mampu didistribusikan secara maksimal secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena masih banyak kartu nelayan yang belum dicetak disebabkan alat pencetak ini ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Jumlah distribusi kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 1885 unit atau sekitar 84,68 % dari jumlah nelayan yang ada. Dengan adanya kartu nelayan, para nelayan sudah dapat mengakses bantuan dari pemerintah karena kartu nelayan ini sebagai salah satu syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sabungan Harahap selaku Kasi Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Bapak Imron Efendi selaku Kasi IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil mengatakan hal yang hampir sama bahwa sosialisasi dan penyuluhan sudah dilakukan terhadap nelayan sebelum

pendataan dan identifikasi nelayan tetapi nelayan masih banyak yang tidak mengetahui manfaat dari kartu nelayan. Dalam pembagian kartu nelayan memang belum sepenuhnya maksimal karena fasilitas tidak berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Untuk mendapatkan bantuan nelayan sudah bisa mengusulkan dengan syarat pengajuan dengan kelompok koperasi nelayan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmadi Anas dan Azmul selaku nelayan mengatakan bahwa nelayan banyak yang belum tahu fungsi dari kartu nelayan. Sedangkan untuk pembagian kartu masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai nelayan belum mendapatkan kartu nelayan. Untuk akses mendapatkan bantuan pemerintah memang sudah dapat digunakan, namun dalam mengusulkan bantuan yang dibutuhkan nelayan terdapat ketidaksesuaian dengan yang diharapkan nelayan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agusman Efendi selaku Ketua Koperasi Nelayan juga mengatakan bahwa banyak nelayan tidak mampu menggunakan kartu nelayan secara maksimal dan pendistribusian kartu belum dibagikan secara merata dan belum dimiliki secara fisiknya disebabkan mesin pencetak kartu yang berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Untuk akses bantuan pemerintah para nelayan sudah bisa dimanfaatkan meskipun kartu belum dimiliki secara fisik tetapi nama dan nomor kartu sudah terdata di ketika pendistribusian bantuan dari pemerintah.

4.2.2 Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya tindakan program implementasi kartu nelayan

Adanya tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggungjawab yang dilakukan pegawai dalam merealisasikan program kartu nelayan. dalam penelitian ini pelaksanaan program kartu nelayan telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sudah ditetapkan. Tindakan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melakukan sosialisasi, identifikasi dan pendistribusian kartu nelayan.

Tindakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal menjalankan program kartu nelayan sudah dijalankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupa sosialisasi fungsi kartu nelayan kepada nelayan yang berada di kabupaten Mandailing Natal. Sosialisasi yang dilakukan kepada nelayan melalui kecamatan dan desa – desa. Pegawai juga melakukan sosialisasi dan identifikasi serta pendistribusian kartu nelayan terhadap nelayan dengan melibatkan stakeholder yang berada di kecamatan dan desa secara baik.

Menurut Lubis (2007 : 9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program kartu nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal yang diberikan kewenangan untuk mensosialisasikan, identifikasi dan

pendataan serta pendistribusian kartu nelayan sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara baik.

b. Adanya Komunikasi antara Pemerintah daerah dengan Stakeholder

Komunikasi yang dijalin adalah hubungan antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kecamatan dan desa – desa untuk menjalankan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal. Komunikasi yang dijalin dalam bentuk kerjasama dengan stakeholder kecamatan dan desa. Melalui surat pemberitahuan kepada kecamatan dan desa untuk segera diteruskan kepada nelayan mengenai sosialisasi dan penyuluhan.

Dalam menjalin komunikasi dengan stakeholder yang berada di kecamatan dan desa terdapat masukan – masukan yang diberikan mengenai kartu nelayan yaitu agar kartu nelayan dapat diberikan kepada yang seharusnya layak untuk mendapatkan kartu nelayan. Hal ini mengingat bahwa sasaran program kartu nelayan memang masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan.

George Edward III (1980 : 148) dalam anggaranya menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi menjadi efektif : 1) komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik. 2) sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung. 3) Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik. 4) Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan program kartu nelayan, komunikasi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal berjalan secara baik dengan melibatkan kecamatan dan desa serta nelayan. Sehingga program kartu nelayan dapat dijalankan secara menyeluruh di kabupaten Mandailing Natal.

c. Adanya Sumberdaya

Dalam menjalankan sebuah program dibutuhkan dukungan sumberdaya agar program yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dukungan sumberdaya untuk program kartu nelayan berupa tersedianya anggaran atau biaya pelaksanaan dan fasilitas pendukung untuk terlaksannya program kartu nelayan.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan, dalam menjalankan program kartu nelayan di Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dukungan untuk merealisasikan program kartu nelayan hanya disediakan biaya atau anggaran untuk kegiatan sosialisasi fungsi kartu nelayan, identifikasi dan pendataan kartu nelayan serta biaya pendistribusian kartu nelayan. Sedangkan fasilitas pendukung untuk pencetakan kartu hanya disediakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Untuk tanggungjawab pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal hanya sebatas fasilitator dari kementerian dan Kelautan di kabupaten dalam merealisasikan program kartu nelayan.

Menurut Nugroho (2003 : 161) implementasi kebijakan publik adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini

setidaknya melalui elemen – elemen berikut, yaitu : a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (standard operating procedures) c) koordinasi, pembagian tugas – tugas di dalam dan diantara dinas – dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber – sumber daya untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam merealisasikan program kartu nelayan, sumberdaya dalam pelaksanaan program kartu nelayan sudah tersedia namun, kurang maksimal disebabkan tidak adanya mesin pencetak kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini menjadi hambatan untuk mendistribusikan kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal.

d. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

Kebijakan dibuat untuk memberikan dampak yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan yang dibuat dapat berupa program – program pemerintah. Program kartu nelayan diharapkan bisa memberikan pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan nelayan sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, program kartu nelayan dapat memberikan manfaat bagi nelayan namun nelayan belum mampu memanfaatkan kartu nelayan sesuai dengan fungsinya karena ketidakpahaman nelayan mengenai kartu nelayan. Sedangkan untuk pendistribusian kartu nelayan masih terdapat nelayan yang belum memiliki kartu nelayan secara fisik, hal ini disebabkan pencetak kartu nelayan yang tidak berada di Dinas Kelautan dan perikanan

Kabupaten Mandailing Natal. Untuk pemanfaatan kartu nelayan sudah mampu di akses tetapi bantuan yang diterima oleh nelayan tidak sesuai dengan keinginan dari para nelayan.

Menurut Ripley dan Franklin (1982 : 4) berpendapat bahwa implementasi apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang di dapatkan nelayan dari program kartu nelayan belum berjalan secara maksimal disebabkan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari kartu nelayan dan pendistribusian kartu nelayan belum dimiliki nelayan secara menyeluruh serta bantuan yang diterima nelayan tidak sesuai dengan keinginan nelayan.

4.3 Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal

Menurut Winarno (2005 : 102) implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan individu atau kelompok – kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan – tindakan tersebut mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupundalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan – perubahan besar dan bahwa tiap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan

– tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan – keputusan kebijakan.

Menurut Dwijowijoto (2003 : 158) implementasi kebijakan publik adalah cara – cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya tindakan program implemementasi kartu nelayan sudah berjalan dengan baik dengan terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dalam bentuk terdistribusinya kartu nelayan yang diterima nelayan di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 85 % atau 1885 Unit.

Komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder sudah berjalan dengan baik dengan kerjasama yang dijalin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dengan Kecamatan dan Desa – desa serta nelayan. Untuk sumberdaya dalam pelaksanaan program kartu nelayan belum sepenuhnya maksimal dengan kurangnya fasilitas pencetak kartu nelayan yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Dukungan fasilitas berupa pencetak kartu menjadi hal yang sangat penting untuk

memberikan kemudahan bagi terlaksananya program kartu nelayan . Sedangkan untuk adanya pengaruh bagi aspek kehidupan belum tercapai disebabkan belum dimanfaatkannya kartu nelayan secara maksimal, pendistribusian kartu belum dibagikan secara menyeluruh dan bantuan yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan nelayan sehingga pemberdayaan terhadap nelayan masih mengalami hambatan. Belum mampunya nelayan memanfaatkan kartu nelayan dengan maksimal menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang kartu nelayan adalah program yang dibuat untuk memperhatikan aspek – aspek yang dibutuhkan nelayan dalam bentuk identitas, perlindungan, pemberdayaan dan kesejahteraan nelayan. Usaha yang dilakukan kementerian kelautan dan perikanan dalam menjalankan programnya memberikan kewenangan bagi provinsi dan kabupaten/kota untuk merealisasikannya. Berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal sudah melaksanakan kewenangan sesuai dengan tertulis dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016.

Adanya tindakan dalam menjalankan program implementasi kartu nelayan dilakukan dengan sosialisasi fungsi kartu nelayan, identifikasi dan pendataan nelayan sampai dengan distribusi kartu nelayan. Tindakan ini dilakukan dengan turun langsung kelapangan ataupun secara tidak langsung melalui pemberitahuan kepada kecamatan dan desa.

Untuk komunikasi yang dijalin dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dengan stakeholder di kecamatan dan desa sudah dilakukan dengan maksimal dan dengan adanya komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan menerima masukan dari nelayan agar program kartu nelayan diberikan kepada yang layak dan tepat sasaran.

Ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan program kartu nelayan dari hasil penelitian belum memadai disebabkan fasilitas dan saran pendukung tidak berada di Dinas Kabupaten/kota. Kekurangan ini yang menjadi hambatan dalam pencetakan kartu nelayan sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal mengalami kendala seperti belum meratanya pembagian kartu kepada nelayan di kecamatan dan desa.

Kartu nelayan diharapkan agar mampu memberi dampak yang berpengaruh bagi kehidupan nelayan seperti kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan. Dampak yang diharapkan belum mampu dimanfaatkan sebagian nelayan dengan keterbatasan terhadap fungsi dan kegunaan dan kartu nelayan, sehingga nelayan hanya sebatas memiliki kartu nelayan. Dari segi fungsi kartu nelayan memang dapat mengakses bantuan dari pemerintah tetapi bantuan kadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran – saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Impelemntasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal melakukan sosialisasi dengan maksimal terhadap nelayan agar nelayan mengetahui fungsi dan kegunaan dari kartu nelayan.

2. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan stakeholder yang berada di kecamatan dan desa agar memudahkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dalam merealisasikan program kartu nelayan
3. Menerima masukan dari nelayan terhadap keluhan yang dialami agar program kartu nelayan tepat sasaran dan diberikan kepada yang layak.
4. Memperhatikan kebutuhan bantuan yang diperlukan nelayan agar bantuan sesuai dengan permintaan nelayan dengan yang diberikan pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said, 2012: *Kebijakan Publik* Salemba Humanika, Jakarta.
- Anderson dan Subarsono, 2005: *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Anggara, Sahya, 2014 : *Kebijakan Publik Pengantar*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Dunn, Wiliiam N, 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Grindle, Merilee, 1980 : *Politics and policy implementation in the third world*, Princnton University Press. New Jersey.
- Lubis, Solly, 2007 : *Kebijakan Publik*, Mandar Maju. Bandung.
- Mazmanian dan Sabatier, 2004: *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Mustopadidjaja, 2002 : *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*, Cendana Kencana Sentosa, Jakarta.
- Moelong, Lexy J, 2006 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Purwanto, Erwan Agus, 2012 : *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Nugroho, Rian, 2003 : *Kebijakan Publik : Formulasi, Implemntasi dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta.
- ,2011 : *Public Policy*, Gramedia, Jakarta.
- Nurdin, Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiono, 2017 : *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Tachjan, H, 2006 : *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPi Bandung- Puslit KP2W Lemit Unpad, Bandung.

Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003 : *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.

Wahab, Solihin Abdul, 2001 : *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rinneka Cipta, Jakarta.

Winarno, Budi, 2016 : *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses dan Studi Komparatif*, Center of academic publishing service, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan

Jurnal :

William, James. 1995. Community Development, Creating Community Alternatives (Vision, Analysis and Practice). 139

Vitayala, Aida. 2000. Tantangan dan Prospek Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Otonomi Daerah : Badan Pengembangan SDM Departemen Pertanian. 139

Sumodiningrat, Gunawan. 1996. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. 139

Pedoman Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Masdewina

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Nelayan Kecil

A. Adanya tindakan program implementasi kartu nelayan

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : tindakan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan program kartu nelayan dengan melaksanakan sosialisasi mengenai kartu nelayan kepada nelayan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal tentang arti pentingnya kartu nelayan yang menjadi salah satu identitas diri bagi nelayan

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : mensosialisasikan kartu nelayan kepada nelayan secara menyeluruh dengan melakukan sosialisasi kartu nelayan melalui kegiatan sosialisasi kartu nelayan perkecamatan, maupun sosialisasi pemberitahuan kepada camat – camat dan kepala desa – kepala desa serta sosialisasi melalui penyuluhan langsung kepada nelayan

3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : dengan cara tidak langsung melakukan pengumpulan data nelayan melalui permintaan data nelayan kepada masing – masing kecamatan untuk disampaikan kepada kepala desa – kepala desa dan secara langsung dengan melakukan pengumpulan data langsung ke lapangan kepada nelayan yang bersangkutan

4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : mendistribusikan kartu nelayan yaitu secara tidak langsung dengan pendistribusian kartu nelayan melalui kecamatan – kecamatan dan kepala desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, secara langsung dengan pendistribusian kartu nelayan kepada nelayan yang bersangkutan

B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan program kartu nelayan dengan melalui sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada nelayan yang ada di wilayah pantai barat Kabupaten Mandailing Natal

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban :dengan pemberitahuan dan permintaan data di kecamatan untuk disampaikan kepada kepala desa – kepala desa yang ada di wilayah pantai barat Kabupaten Mandailing Natal

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, apakah ada keluhan dari nelayan terhadap program kartu nelayan ?

Jawaban :stakeholder kecamatan berharap agar kartu nelayan ini tepat sasaran dalam artian diberikan kepada nelayan yang benar – benar memiliki pekerjaan sebagai nelayan

C. Adanya sumberdaya

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban :ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal hanya sebagai pengumpul data dan penginput data serta pendistribusian kartu nelayan sedangkan untuk fasilitas sarana pencetakan kartu ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal hanya sebatas anggaran untuk sosialisasi, pengumpulan data dan pendistribusian saja, sedangkan untuk anggaran pengadaan kartu nelayan ini semuanya berada di Kementerian

Kelautan dan Perikanan RI, hal ini karena program ini merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban :fasilitas pendukung untuk melancarkan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal alat pencetak kartu nelayan yang ada di Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

4. Bagaimana tanggungjawab pegawai Dinas kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : tanggungjawab pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal yaitu tanggungjawab sebatas memfasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam hal pengumpulan data , penginputan data dan pendistribusian data

D. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakans secara maksimal ?

Jawaban : belum sepenuhnya maksimal karena masih banyak nelayan yang belum tahu manfaat yang akan diperoleh dari kartu nelayan itu sendiri

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban : pendistribusian kartu nelayan belum didistribusikan secara menyeluruh, hal ini karena masih banyak kartu nelayan yang belum dicetak disebabkan alat pencetak kartu nelayan ini ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban : akses bantuan pemerintah dengan adanya kartu nelayan sudah bisa di manfaatkan oleh nelayan, hal ini karena kartu nelayan merupakan salah satu persyaratan untuk menerima bantuan dari pemerintah.

Pedoman Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Sabungan Harahap, S.P

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Kasi Pendidikan dan Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil

A. Adanya tindakan implementasi program kartu nelayan

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : pegawai membuat kegiatan sosialisasi fungsi kartu nelayan kepada nelayan

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : memberitahukan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kepada camat dan seterusnya camat memberitahukan kepada kepala desa – kepala desa

3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : pengumpulan data dan identifikasi dengan menghadirkan nelayan dan diberikan formulir untuk diisi sesuai dengan ketentuan yang diperlukan

4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : Pendistribusian kartu nelayan dilakukan melalui kepala desa dan kepada nelayan secara langsung

B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : menjalin kerjasama dengan kecamatan dan desa – desa di Kabupaten Mandailing Natal

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : melalui pemberitahuan kepada kecamatan dan disampaikan kepada kepala desa

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, apakah ada keluhan dari nelayan terhadap program kartu nelayan ?

Jawaban : keluhannya mengenai pendistribusian kartu yang belum merata

C. Adanya sumberdaya

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : ketersediaan sarana dan prasarana hanya tersedia di Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : dukungan anggaran hanya untuk sosialisasi, identifikasi dan pendistribusian kartu.

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : fasilitas hanya sebatas biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan

4. Bagaimana tanggungjawab pegawai Dinas kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawab : tanggungjawab pegawai melaksanakan program kartu nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakans secara maksimal ?

Jawaban : belum sepenuhnya maksimal

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban : pendistribusian kartu nelayan hampir menyeluruh

3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban : nelayan sudah bisa mengakses bantuan dari pemerintah dengan adanya kartu nelayan

Pedoman Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Imron Efendi, S.Pt

Umur : 39 Tahun

Jabatan : Kasi IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil

A. Adanya tindakan implementasi program kartu nelayan

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : menjalankan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi kartu nelayan

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : melibatkan kecamatan dan desa untuk sosialisasi tentang kartu nelayan

3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : megumpulkan data melalui kecamatan dan desa – desa dan nelayan

4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : mendistribusikan melalui kecamatan dan desa dan kepada nelayan yg mendapatkan kartu

B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : menjalin koordinasi dengan nelayan dan kecamatan serta desa

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : pemberitahuan kepada para camat dan kepala desa

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, apakah ada keluhan dari nelayan terhadap program kartu nelayan ?

Jawaban : agar kartu nelayan diberikan kepada yang layak menerima kartu

C. Adanya sumberdaya

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : sarana dan prasarana berada di Di dinas kelautan dan Perikanan Provinsi, disini hanya sebagai memfasilitasi.

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : biaya realisasi program hanya untuk sosialisasi, pendataan dan pendistribusian kartu nelayan

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : fasilitas yang mendukung program kartu nelayan hanya biaya program kartu nelayan saja

4. Bagaimana tanggungjawab pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal?

Jawaban : melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan tentang program kartu nelayan

D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakan secara maksimal ?

Jawaban : tidak secara maksimal disebabkan nelayan belum tahu fungsi kartu nelayan

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban : belum merata tetapi sudah banyak yang mendapatkan

3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban :sudah bisa

Pedoman Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Rahmadi Anas

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

A. Adanya tindakan implementasi program kartu nelayan

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : mereka melakukan sosialisasi kartu nelayan kepada nelayan

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : melalui kecamatan dan kepala desa juga kepada nelayan

3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : meminta bantuan kepada nelayan mengisi formulir kartu nelayan

4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : dibagikan kepada nelayan melalui kecamatan dan kepala desa lalu kepada nelayan

B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : mereka memeritahukan kepada kepala desa untuk meminta data nelayan

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, apakah ada keluhan dari nelayan terhadap program kartu nelayan ?

Jawaban : keinginan nelayan agar kertu nelayan dibagi merata dan tepat

C. Adanya sumberdaya

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : setahu saya dari sosialisasi, ini program kementerian

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang memberikan

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : tidak ada

4. Bagaimana tanggungjawab pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan di kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik menjalankan program kartu nelayan

D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakans secara maksimal ?

Jawaban : belum maksimal

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban :pembagian belum menyeluruh, masih ada nelayan yang belum mendapatkan kartu

3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban : sudah bisa

Pedoman Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Agusman Efendi

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Ketua Koperasi Nelayan

A. Adanya tindakan implementasi program kartu nelayan

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : mereka mengadakan sosialisasi kartu nelayan dengan mengundang perwakilan nelayan

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : mereka melakukan sosialisasi melalui kecamatan dan kepala desa untuk disampaikan kepada koperasi nelayan

3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : dengan mengumpulkan nelayan untuk diminta mengisi formulir dari nelayan

4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : pembagian kartu diberitahukan ke kepala desa lalu disampaikan kepada koperasi nelayan

B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : menjalin komunikasi yang baik dengan para camat dan kepala desa

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : kerjasama untuk meminta data dan sosialisasi mengenai nelayan

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, apakah ada keluhan dari nelayan terhadap program kartu nelayan ?

Jawaban : kami berharap agar kartu nelayan diberikan kepada yang layak menerima dan dibagikan dengan merata

C. Adanya sumberdaya

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : untuk sarana tidak berada di Dinas Kelautan dan perikanan Mandailing Natal tapi berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera utara

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : Biaya diberikan kementerian kepada Dinas kelautan dan Perikanan Mandailing Natal

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : setahu saya hanya biaya menjalankan program kartu nelayan

4. Bagaimana tanggungjawab pegawai Dinas kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal hanya memfasilitasi

D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakan secara maksimal ?

Jawaban : tidak sepenuhnya maksimal akibat kurang tahunya fungsi kartu nelayan

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban : belum merata, masih da nelayan yang belum dapat kartu nelayan secara fisik

3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban : sudah bisa mendapatkan bantuan

Pedoman Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Azmul

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

A. Adanya tindakan implementasi program kartu nelayan

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : mereka sosialisasi dan penyuluhan di kecamatan dan desa

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : dengan memberitahu kecamatan

3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : mereka meminta data melalui nelayan

4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : dibagikan melalui kecamatan dan desa dan nelayan

B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : melakukan tugasnya di kecamatan menjumpai nelayan

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : bekerjasama dengan baik meminta kebutuhan program kartu nelayan

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, apakah ada keluhan dari nelayan terhadap program kartu nelayan ?

Jawaban : supaya kartu nelayan dijalankan dengan baik

C. Adanya sumberdaya

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : fasilitas berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : anggaran diberi oleh kementerian kelautan dan perikanan

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : setahu saya tidak ada

4. Bagaimana tanggungjawabpegawai Dinas kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ?

Jawaban : sudah baik dengan menjalankan tugasnya

D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakan secara maksimal ?

Jawaban : belum digunakan dengan maksimal

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban : masih ada nelayan yang tidak dapat kartu

3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban : sudah bisa



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624507 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6025474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Slk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan *Ilmu Administrasi Negara*
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 13 Desember 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : *RONI SETIAWAN*
 N P M : *4503100181*
 Jurusan : *Ilmu Administrasi Negara*
 Tabungan sks : *130..... sks, IP Kumulatif 3,50.*

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<i>Implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 16 tahun 2016 tentang Kartu Nelayan di Dinas kelautan dan perikanan kabupaten mandailing Natal</i>	<i>dit</i>
2	<i>Implementasi peraturan menteri kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2017 tentang Surat laik operasi kapal perikanan di dinas kelautan dan perikanan kabupaten mandailing Natal</i>	
3	<i>Implementasi peraturan menteri pertanian tentang pedoman perizinan usaha perkebunan di dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten mandailing Natal</i>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposai;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua, *dit*

Pemohon, 1

Ronery
 (RONI SETIAWAN.....)

Pembimbing *Nabil Khawirah*



Zahidul Uloomul 'Alim
Zahidul Uloomul 'Alim

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.068/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : **13 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RONI SETIAWAN**
N P M : 1503100131
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 13 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 11 Rabiul Akhir 1440 H
19 Desember 2018 M



Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Zhagah Cahaya at Terpertas
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 06 Januari 2017

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RONI SETIAWAN
 N P M : 1503100131
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.266/SK/IL3/UMSU-03/F/2016.. tanggal 03 Desember 2016 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 tahun 2016 tentang Kartu Nelayan di Dinal Kelautan dan perikanan kabupaten Mandailing Natal.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(NAILI KHAIRAH S.P., M.Pd.)

Pemohon,

(RONI SETIAWAN)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 021/KEP/III.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Januari 2019
 Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang LAB. & R 301-C FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nalij Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
16	YANI ANDRIESTI FIFY	1503100091	MUJAHIDDIN, S.Sos.,MSP.,H.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	HUMAN GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
17	KHAJRUNNISA LUBIS	1403100095	SYAFRUDDIN, S.Sos.,M.H.	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM RANGKA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 16 MEDAN
18	RUDI SYAPUTRA NST	1503100098	SYAFRIZAL, Drs.,M.Si.,Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PERBERDAYAAN PETANI DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDALING NATAL
19	RONI SETIAWAN	1503100131	SYAFRIZAL, Drs.,M.Si.,Ph.D.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG KARTU NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDALING NATAL
20	RANDI PERMANA	1503100067	MUJAHIDDIN, S.Sos.,MSP.,H.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI DINAS PERUMAHAN SAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H
 09 Januari 2019 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Teguh Berani dan Terpercaya
 Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **RONI SETIAWAN**
 N P M : **1503100131**
 Jurusan : **ILMU Administrasi Publik**
 Judul Skripsi : **Implementasi peraturan menteri, kelantaran dan perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang fungsi Melagan di Dinas kelantari dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	30 des 2018	Kata belalang masalah	
	2 Jan 2019	Kata belalang masalah	
	3 Jan 2019	uraian teoritis	
	6 Jan 2019	metode penelitian	
	7 Jan 2019	kategorisasi & definisi konsep	
	8 Jan 2019	kerangka konsep	
	8 Jan 2019	kec propasal	
	9 feb 2019	draft wawancara	
	4 feb 2019	revisi draft wawancara	
	4 maret 2019	latih dan pembahasan	
	6 maret 2019	kec skripsi	

Medan,2019...

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

(Dr. Anggraeni Solata, S.Sos, M.Pd)

(Nabilah Khairunnah, S.Pd, M.Pd)

(Nabilah Khairunnah, S.Pd, M.Pd)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 384/JUND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
36	DETI PRATIWI	1503100052	IDA MARTINELLY, SH., MM	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PASAR BERSIH DALAM RANGKA PENERBITAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR GAMBIR KOTA TEBING TINGGI
37	ANDINI UTAMI ASRI	1503100042	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA MEDAN
38	SUCI HANDAYANI	1503100128	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	PENGARUH GAYA KEPIMPINAN SITUASIONAL TERHADAP PRESTASI PEGAWAI DI BADAN PENGELUARAN PAJAK RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
39	RONI SETIAWAN	1503100131	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	Drs. R. KUSNADI, M.AP	NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDALING NATAL
40	AULIA FITRIA SUCI	1503100096	Drs. R. KUSNADI, M.AP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 40 TAHUN 2015 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI

Notulis Sidang :

Medan, 04 Rabab 1440 H
11 Maret 2019 M

Ditandatangani oleh :


Rektor

Dr. R. R. KUSNADI, S.Sos., M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian



Sekretaris


Dr. ZULFAHMY, M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 151/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 25 Jumadil Awal 1440 H
01 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan**
Kabupaten Mandailing Natal
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RONI SETIAWAN**
N P M : 1503100131
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



[Handwritten Signature]
Drs. ZULFAHMI., M.I.Kom.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING TELP. 0636 - 326191

PANYABUNGAN

KODE POS. 22798

Nomor : 523/ 05) /DKP/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Melaksanakan
Izin Penelitian

Panyabungan, 11 Februari 2019

Kepada :

Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

di -

Medan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak / Ibu bahwa benar mahasiswa :

Nama : **RONI SETIAWAN**
NPM : 1503100131
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG
KARTU NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Bakarein LUBIS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620911 199103 1 003

